

DINAMIKA POLITIK KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL (STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH)

Yuda Perdana

NPP. 30.0733

Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: yuper33@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP, M.Si, MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *In the simultaneous regional elections there was an unprecedented political event in Indonesia. The incident was the implementation of regional head elections with a single candidate against an empty box in the simultaneous regional head elections in 2020. Grobogan Regency is one of the districts that experienced this single candidate incident. This research is entitled "**POLITICAL DYNAMICS OF SINGLE CANDIDATE REGIONAL HEADS (CASE STUDY OF GROBOGAN REGENT ELECTION OF CENTRAL JAVA PROVINCE)**".* **Purpose:** *Knowing how the dynamics occur and the causative factors that support the emergence of a single candidate pair in the Grobogan Regent Election of Central Java Province.* **Method :** *This research uses qualitative methods with an inductive approach. Data sources use primary and secondary data sources, Data collection techniques are carried out using interviews and documentation. Data analysis techniques are obtained through data reduction, data presentation and conclusions.* **Result :** *The results of this study show that several factors were found that caused the occurrence of a single candidate, namely victory in the contestation of regional elections being the main factor that made political parties prefer coalitions rather than carrying cadres from their own parties. One of which is Sri Sumarni's performance as an incumbent who is quite satisfactory to the people of Grobogan Regency making the people of Grobogan Regency still support her.* **Conclusion:** *At the end of this thesis, the researcher presented several suggestions for the Grobogan Regency KPU to always provide continuous education and knowledge about the importance of conducting this election to the community and reflecting on the 2020 simultaneous regional elections in Grobogan Regency with the presence of a single candidate, it has promised a justice process in running a democratic government system for the 2020 simultaneous regional elections in Grobogan Regency.*

Keyword: *Single candidate pair, political party, regional election.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pada pelaksanaan Pilkada serentak terdapat sebuah kejadian politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Kejadian tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Kabupaten Grobogan menjadi salah satu Kabupaten yang mengalami kejadian calon tunggal ini. Penelitian ini berjudul “**DINAMIKA POLITIK KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL (STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH)**”. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi serta faktor-faktor penyebab yang mendukung munculnya pasangan calon tunggal pada Pemilihan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika politik kepala daerah yang terjadi pada pemilihan bupati Grobogan tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku dengan berdasarkan teori menurut Vilfredo Pareto menggunakan 4 dimensi ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya calon tunggal yakni kemenangan pada kontestasi Pemilihan kepala daerah menjadi faktor utama yang membuat partai politik lebih memilih berkoalisi daripada mengusung kader dari partainya sendiri serta terdapat kendala institusional dimana banyak peraturan-peraturan yang menghambat munculnya banyak bakal calon kandidat yang mempunyai potensi untuk maju dalam Pilkada serta mengetahui beberapa aspek salah satunya kinerja Sri Sumarni sebagai petahana yang cukup memuaskan masyarakat Kabupaten Grobogan membuat masyarakat Kabupaten Grobogan tetap mendukungnya. **Kesimpulan:** Pada bagian akhir skripsi ini peneliti mengemukakan beberapa saran untuk KPU Kabupaten Grobogan untuk selalu memberikan edukasi dan pengetahuan yang berkesinambungan tentang pentingnya pelaksanaan pemilu ini kepada masyarakat dan bercermin dari Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Grobogan dengan hadirnya calon tunggal sudah menjanjikan adanya proses keadilan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis untuk Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Grobogan.

Kata Kunci : Pasangan Calon Tunggal, Pilkada, Partai Politik.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara kesatuan, baru merupakan wujud pemerintahan demokrasi yang mana kewenangan dan kekuasaan pemerintah daerah dijalankan secara efektif dalam pemberdayaan kepentingan masyarakat (Agus Salim, Andi Gadjong 2007:2). Pada Amandemen

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berhasil membawa transformasi penting pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab VI Tentang Pemerintah Daerah pada pasal 18 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas kota dan kabupaten yang mana pada masing-masing provinsi, kabupaten dan kota itu memiliki pemerintah daerah, yang resmi dan diatur oleh undang-undang”. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota menjalankan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan yang berbentuk republik mendasari penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan asas desentralisasi. Makna asas ini menimbulkan asas otonom, dengan esensi pemberian kewenangan pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah itu terdiri dari lembaga legislatif yaitu DPRD dan lembaga eksekutif yaitu Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) sebagai pejabat pelaksana pemerintahan daerah. Secara etimologis pengertian dari demokrasi berasal dari bahasa Yunani, Istilah “demokratia” ini terdiri dari dua kata yaitu rakyat dan kratos adalah kekuatan dan kekuasaan. Demokratis berarti kekuasaan rakyat. Sejak abad ke-5 SM Prinsip demokrasi sering digunakan dalam menyebut sebuah sistem politik di Negara serta kota Yunani. Kamus besar Bahasa Indonesia menjelaskan penafsiran demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mana seluruh warganya ikut serta berpartisipasi memerintah melalui perwakilannya dan menurut KBBI, makna demokrasi ini menunjuk pada sikap atau cara hidup yang mengedepankan persamaan kewajiban dan hak perlakuan yang serupa untuk seluruh rakyat. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah bagian dari pemilu sebagai bentuk implementasi dari demokrasi itu sendiri. Pilkada adalah sebuah mekanisme prosedural dalam pemilihan kepala daerah yang merupakan jabatan politik dengan tanggung jawab yang besar untuk memimpin jalannya roda pemerintahan di suatu daerah. Melalui mekanisme pilkada ini, rakyat dengan tegas memberikan legitimasi kepada kepala daerah yang terpilih untuk melaksanakan tanggung jawabnya melalui keputusan-keputusan maupun kebijakan-kebijakan politik yang di tetapkan. Keputusan dan kebijakan yang telah diambil oleh kepala daerah yang sudah terpilih akan memberikan dampak pada masyarakat secara langsung, sehingga kepala daerah terpilih harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Proses pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pilkada selalu disiapkan dengan baik dan didukung oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengikat. Namun pada kenyataannya, anomali politik seringkali muncul dan tidak bisa dihindarkan, hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan pilkada menjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Munculnya pasangan calon tunggal seringkali menjadi pembahasan hangat pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Munculnya kepala daerah calon tunggal dimulai pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak tahun 2015, kemudian berlanjut di tahun-tahun selanjutnya. Mengutip dari data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki data bersumber dari Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 hingga 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2015 hanya terdapat 3 daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan calon tunggal. Jumlah tersebut meningkat menjadi 9 daerah pada tahun 2017, kemudian 16 daerah tahun 2018. Sedangkan tahun 2020, fenomena ini mencapai 25 daerah. Asumsi tersebut muncul disebabkan sebuah pernyataan demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat. Dapat diartikan bahwa demokrasi sebatas pengakuan hak konstitusi dalam hal memilih maupun dipilih ketika proses pemilu. Keberadaan calon tunggal secara tidak langsung memaksa masyarakat memilih pasangan calon meskipun ada alternatif. Seharusnya masyarakat disuguhkan kontestasi visi dan misi masing-masing pasangan calon kepala daerah. Namun dengan kondisi tersebut masyarakat tidak bisa mendapatkan kesempatannya untuk memilih yang terbaik diantara pasangan calon yang baik. Kotak kosong bukanlah alternatif terbaik karena jika kotak kosong menang, maka akan menyebabkan penundaan pemilihan ke tahun depan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan ulasan singkat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan topik penelitian yang hamper sama dengan topik yang akan diteliti. Penelitian yang pertama yaitu dari skripsi Reza Syahputra, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Opini Masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu Terhadap Calon Tunggal Walikota Tebing Tinggi 2017”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang merupakan kajian komunikasi politik. Penelitian ini menggunakan konsep opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu terhadap calon tunggal Walikota Tebing Tinggi 2017 (Reza, 2017).

Penelitian yang kedua yaitu artikel jurnal Veki Edizon Tuhana, Pawito, Mahendra Wijaya dalam Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret yang berjudul, “Komunikasi Politik Pasangan Calon Tunggal terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kefamanu Pada Pilkada 2015 di Kabupaten TTU Provinsi NTT” Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan komunikator politik, hubungan pesan politik, hubungan model pendekatan sosiologis (Tuhana, Pawito, Mahendra, 2015)

Penelitian yang ketiga yaitu skripsi Melva Mega Nanda, Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015)” Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal yang gagal pada pemilihan kepala daerah sehingga diperlukan adanya kesiapan dari berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara pemilihan. Penelitian ini menggunakan konsep pemilihan kepala daerah (Melva, 2015)

Penelitian yang keempat yakni Tesis Abdul Fattah, Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 yang berjudul “Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa undang-undang dan historis. Penelitian ini menggunakan konsep Shura atau pemaparan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai dengan argumentasi dalam islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami akibat dan implikasi yuridis dari putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015 atas

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dan mengetahui perihal relevansi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal (Abdul, 2018)

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Topik dari keempat penelitian diatas pada dasarnya mempunyai kesamaan konsep dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Dimana terdapat kesamaan terkait fenomena calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni terkait peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana dinamika yang terjadi antara partai politik dan petahana sehingga menyebabkan munculnya calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Grobogan.

1.5 Tujuan

Topik dari keempat penelitian diatas pada dasarnya mempunyai kesamaan konsep dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Dimana terdapat kesamaan terkait fenomena calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni terkait peneliti ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana dinamika yang terjadi antara partai politik dan petahana sehingga menyebabkan munculnya calon tunggal pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Grobogan.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Menurut pendapat David Williams dalam Moleong (2013: 5) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah “pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah”, lalu menggunakan desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif adalah desain yang digunakan untuk memecahkan permasalahan secara umum dan untuk menggambarkan permasalahan pada saat ini. , menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan (Sugiyono, 2017: 289) mengatakan bahwa teknik *purposive sampling* merupakan teknik dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.. peneliti menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan dimana peneliti ingin suatu wawancara yang lebih bebas dan ingin menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka dari informan sebagai sumber data, Teknik dokumentasi merupakan pendukung dari Teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dilanjutkan Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis hasil penelitian dan analisis menggunakan teori Elit menurut Vilfredo Pareto (2017) dalam 4 dimensi, didapat kesimpulan bahwa dinamika politik kepala daerah yang terjadi pada pemilihan bupati Grobogan tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

3.1 Dimensi Hukum

Peneliti Ingin mendiskusikan dimensi hukum ini secara lebih detail dengan indikator sebagai berikut :

A. Pejabat Publik Harus Patuh Terhadap Hukum

Hanya terdapat satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan yang memenuhi Persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Undang-Undang Yang Menghambat Munculnya Kandidat Potensial. Tingginya syarat dukungan yang diberikan untuk bakal pasangan calon dari jalur perseorangan menjadi syarat yang berat untuk bakal calon lain yang ingin berpartisipasi melalui jalur perseorangan, sehingga pada pemilihan bupati Grobogan hanya menghasilkan satu pasangan calon.

C. Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu waktu atau satu putaran cenderung membuat partai politik lebih memilih berkoalisi daripada bersaing dengan petahana.

3.2 Dimensi Politik

Keikutsertaan elit-elit politik local dalam pemilihan kepala daerah membuat partai politik enggan untuk bersaing dengan petahana, berikut peneliti akan jabarkan secara lebih rinci :

A. Kehadiran Petahanan selama masa jabatan sebelumnya, Ibu Sri Sumarni dalam masa kepemimpinannya sebagai Bupati Grobogan telah menunjukkan kinerja yang bagus. Hal ini membuat kandidat calon dari partai-partai lain enggan untuk bersaing.

B. Partai Politik lebih memilih untuk berkoalisi daripada mengusung kader dari partainya sendiri karena adanya calon kuat dari petahana,

C. Pihak petahana berasal dari partai PDI-P yang sudah mempunyai banyak basis massa di Kabupaten Grobogan sehingga mempunyai dukungan yang sangat besar.

3.3 Dimensi Ekonomi

tingginya biaya politik membuat pasangan calon yang muncul hanya satu. Biaya politik yang tinggi pada semua tahapan hingga kontestasi Pilkada selesai hanya mampu dipenuhi oleh Pasangan calon Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto.

3.4 Dimensi Pendidikan

Pendidikan yang tinggi membuat elektabilitas dari pasangan calon petahana meningkat. Pejabat Publik Harus Memiliki Pendidikan Yang Tinggi, Pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto memiliki latar belakang Pendidikan tinggi hingga program Doktoral sehingga berpengaruh pada peningkatan kepercayaan publik.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Banyaknya syarat yang harus dipenuhi dan dibuktikan secara sah membuktikan bahwasannya dimensi hukum menjadi salah satu indikator kunci munculnya calon tunggal karena hukum yang berlaku tentu saja harus dipatuhi. Keputusan MK yang mengatur batas syarat pendaftaran menjadi kendala institusional dimana peraturan-peraturan yang menghalangi munculnya kandidat bakal calon yang mempunyai potensi untuk ikut serta dalam Pilkada. Tingginya

syarat dukungan yang ditetapkan bagi bakal pasangan calon dari jalur perseorangan atau independent sebesar 6,5% sampai 10% jumlah penduduk menjadi hambatan calon lain yang akan ikut berpartisipasi dalam Pilkada melalui jalur perseorangan. Namun tentu saja hal ini menjadi acuan bagi penyelenggara untuk tetap berpedoman dengan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian dan analisis menggunakan teori Elit menurut Vilfredo Pareto (2017) dalam 4 dimensi, didapat kesimpulan bahwa dinamika politik kepala daerah yang terjadi pada pemilihan bupati Grobogan tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dan memenuhi persyaratan yang berlaku, Perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan bagi masyarakat oleh KPU Kabupaten Grobogan yang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait agar masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi politik untuk kemajuan pembangunan di setiap daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu informan utama saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Dinamika Politik Kepala Daerah Calon Tunggal untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Rosada Karya.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Vilfredo, Pareto. (2017). *The Mind and Society* terjemahan And Edition. Livingston, Andrew Bongiorno & Arthur. New York: Harcourt, Brace and Co.

B. SKRIPSI

Syahputra, Reza. “Opini Masyarakat Kelurahan Tambangan Hulu Terhadap Calon Tunggal Walikota Tebing Tinggi 2017”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Melva Mega Nanda. “Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Putusan MK No. 100/PUU-XIII-2015)”. Universitas Sumatera Utara, 2015

Fattah, Abdul “Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Dalam Perspektif Shura”. Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

C. Jurnal

Veki Edizon Tuhana, Pawito, Mahendra Wijaya. “Komunikasi Politik Pasangan Calon Tunggal terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kefamanu Pada Pilkada 2015 di Kabupaten TTU Provinsi NTT”. Universitas Sebelas Maret, 2015.

